

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN
PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**

**I Gusti Agung Ayu Yuliantika Dewi
Anak Agung Gede Oka Wisnumurti
I Made Sumada**

*Program Studi Magister Administrasi Publik
Universitas Warmadewa Denpasar*

agungyuli14@gmail.com
agung.wisnumurti@warmadewa.ac.id
imadesumada@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the Implementation of the Policy of Information System and National Land Affairs Management (SIMTANAS) to public services in the Land Affairs Office of Badung Regency. The quality of the service given in the Land Affairs Office of Badung Regency has not yet maximum and there are still many complaints from the people. Based on the reality, the problem proposed are that how the Implementation of the Policy of Information System and National Land Affairs Management (SIMTANAS), and how effective and efficient of the implementation affect to the land affairs service quality in the Land Affairs Office of Badung Regency. In order to answer these problems, the research was qualitative research method with descriptive research type. The data obtained through observation and comprehend interview processes, secondary data and also utilizing documentary results. Informant selection was carried out by purposive sampling. Data analysis process was performed by using the Donald Van Meter and Carl Van Horn theories, categorizing and combining data that was obtained, and also determining some relevance correlations with those data. Data validation was carried out with triangulation of data source so data served are valid data. Result of this research shows that there has been improvement of land affairs service quality in Land Affairs Office of Badung Regency after implementing the SIMTANAS policy, although not yet maximal and it need system information and management development so that the land affairs service quality that given will enjoyed by all of the society.

Keywords: Policy, Implementation of Policy, and the Information System Land Affairs Management

PENDAHULUAN

Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. Disadari bahwa kondisi aparatur Negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan belum efisien dan lemah antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik yang rendah dan terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Larasati, 2007:42). Paradigma yang dipergunakan para pengelola pelayanan publik cenderung lebih bersifat direktif yang hanya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan pimpinan organisasinya saja. Seharusnya, pelayanan publik dikelola dengan paradigma yang bersifat suportif dimana lebih memfokuskan

diri kepada kepentingan masyarakatnya. Pengelola pelayanan harus mampu bersikap menjadi pelayan yang sadar untuk melayani bukan untuk dilayani (Larasati, 2007:36).

Sejalan dengan arus globalisasi yang terjadi diseluruh dunia pada saat ini kebutuhan informasi semakin penting dan mendesak. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi selain melakukan semua pengolahan transaksi yang diperlukan oleh suatu organisasi, juga memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan proses pengambilan keputusan. Pesatnya perkembangan organisasi publik yang ada pada saat ini, jika ditinjau dari segi administrasi Negara, membuat usaha untuk merumuskan kerangka kerja (*framework*). Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada organisasi publik merupakan kebutuhan yang mendesak (Sutabri, 2005:17), pentingnya SIM dalam konteks organisasi publik ini salah satu penyebabnya adalah bahwa organisasi sekarang cenderung mendasarkan pengambilan keputusannya pada sistem informasi, dan bukan pada struktur hirarki wewenang/tanggung jawab yang statis, pemimpin-pemimpin strategik dalam sektor publik modern memberdayakan para manager dan karyawan mereka untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pelayanan publik. Terkait dengan hal ini para pemimpin dalam sektor publik membutuhkan desain sistem perencanaan yang strategik dan tepat (Gasperz, 2004:2). Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan dalam membuat suatu keputusan manajemen, teknologi atau komputerisasi adalah unsur utama yang berpengaruh. Kemampuan komputer telah membantu perkembangan konsep SIM karena perangkat keras dan perangkat lunak telah membuka dimensi baru yang digunakan dalam konseptualisasi sistem informasi bagi sebuah organisasi. Penggunaan komputer di dalam SIM sangat banyak membantu para manager dalam proses pengambilan keputusan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, adalah salah satu kantor pertanahan yang telah menerapkan komputerisasi sistem informasi manajemen untuk pelayanan pertanahan. Kondisi pelayanan sebelum diterapkannya komputerisasi sistem informasi jangka waktu kegiatan tidak terjadwal, data yang kurang akurat, pelaksanaan pendaftaran yang terpisah di beberapa petugas, adanya kesulitan dalam pencarian data karena kurang efisiennya dalam pengarsipan data, pengetikan dilaksanakan secara manual sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengetikan sertifikat sangat besar, pembuatan laporan bulanan masih manual rawan kesalahan, penyajian informasi pertanahan masih manual, tidak adanya transparansi, adanya keluhan dari masyarakat karena kurang cepatnya dalam pelayanan, rendahnya biaya operasional, tidak adanya peningkatan keterampilan staf.

Setelah diterapkannya komputerisasi dalam sistem informasi, diharapkan segala urusan yang menyangkut pelayanan pertanahan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Akan tetapi kenyataannya dilapangan belum sepenuhnya kebijakan SIMTANAS dapat berjalan dengan lancar. Masih ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga pelayanan pertanahan belum berjalan secara optimal. Sehubungan dengan fenomena yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "*Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) terhadap pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung*". Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan bagaimanakah dampak Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan SIMTANAS serta mengetahui dampak implementasi kebijakan SIMTANAS terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Penelitian tentang SIMTANAS sebelumnya dilakukan oleh Kadek Apsariani dan I Ketut Artadi (2014) mengenai "Pelayanan publik melalui Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) Berbasis Short Message Service

(SMS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung” di dalam penelitian ini hanya membahas tentang pelayanan publik SIMTANAS berbasis sms saja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang implementasi kebijakan SIMTANAS secara menyeluruh tentunya cakupannya lebih luas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarti Setianingsih (1998) mengenai “Keberhasilan Pengembangan Sistem Informasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”. Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama meneliti tentang sistem informasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terakhir penelitian yang dilakukan Rafiq Laksmana (2009) tentang “Implementasi Teknologi Informasi dan Pendaftaran Tanah yang Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia”. Persamaannya dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang implementasi dari suatu kebijakan pertanahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui proses observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, wawancara mendalam dengan pelaksana kebijakan dan beberapa masyarakat selaku pengguna layanan pertanahan, dan data sekunder yang diperoleh dari hasil dokumenter yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta arsip. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Proses analisa data dilakukan dengan menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn, mengkategorikan dan mengkombinasikan data-data yang diperoleh dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan dengan data-data tersebut. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang abash.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan SIMTANAS dipengaruhi oleh enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Pertama, dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan masih diperlukan pensertifikatan tanah secara teratur, tertib, dan prosedural sesuai dengan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP), reforma agraria membutuhkan kebijakan nasional hingga daerah secara konsisten dan menyeluruh. Karena itulah, kewenangan pemerintah di bidang pertanahan mesti sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, lintas sektor dan lembaga, dalam menyelesaikan persoalan pertanahan atau sengketa pertanahan sudah sesuai dengan aturan yang ada, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan telah merumuskan tujuan yang hendak dicapai.

Kedua, dilihat dari variabel sumber daya, pengadaan pegawai belum disusun berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Untuk peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan jabatan yang diembannya memerlukan standar baku pendidikan dan pelatihan yang saat ini belum dimiliki, kedisiplinan dan budaya kerja pegawai harus mendapat perhatian yang serius, pemahaman terhadap peraturan kedisiplinan pegawai perlu ditingkatkan dan pelaksanaan *reward and punishment* harus diterapkan dengan konsisten, masih adanya pegawai yang kurang memahami tentang kebijakan sistem informasi manajemen pertanahan nasional karena sosialisasi tentang kebijakan ini hanya di paparkan secara materi tidak ada pelatihan khusus yang di lakukan agar pegawai lebih memahami kebijakan tersebut, terkait dengan kesejahteraan pegawai dengan beban kerja yang ada dan reformasi birokrasi yang terus dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung seyogyanya harus diikuti dengan dilaksanakannya remunerasi terkait dengan gaji pegawai.

Ketiga, dilihat dari variabel karakteristik organisasi pelaksana, penyegaran aparat pemerintah yang berjiwa kerakyatan, bersikap bijaksana, bermental tangguh dan solid menjadi syarat pokok yang akan menggerakkan Kantor Pertanahan di Kabupaten Badung kearah yang tepat sesuai dengan visi misi kelembagaannya.

Keempat, dilihat dari variabel komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, para pegawai mengetahui dan memahami secara baik tentang kebijakan simtanans, adanya permasalahan khususnya *job description* masing-masing petugas, belum tersedianya dukungan finansial secara khusus yang dialokasikan untuk mendukung simtanans, perlunya peningkatan pemahaman dan keterampilan petugas. Kelima dilihat dari variabel disposisi atau sikap para pelaksana. Sikap para pegawai sangat mendukung implementasi kebijakan simtanans. Keenam dilihat dari variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, faktor lingkungan sosial menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan, kondisi kebudayaan masyarakat sasaran kebijakan, dimana tingkat kepatuhan terhadap kepemimpinan seseorang Kepala Desa dan aturan (*unstatutory law*) yang dibuatnya masih memiliki efek dipatuhi dengan kuat. Sehingga apabila perangkat desa tidak mengizinkan atau memberi restu maka masyarakat tidak akan mudah menerima dan bahkan tidak menerima program maupun kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan SIMTANAS dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Dampak positif antara lain berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan ketahanan pangan (*prosperity*), berkontribusi secara nyata dalam peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) (*equity*), berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air serta melakukan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari (*social welfare*).berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat (*sustainability*).

Dampak negatif antara lain kesulitan memahami dokumen-dokumen lama yang dibuat sebelumnya dari sebuah rangkaian hak-hak terdahulu karena adanya perubahan penggunaan bahasa dan formatnya, pelaksanaan pelayanan pertanahan sangat bergantung pada sistem pertanahan pusat saja, apabila sistem mengalami gangguan maka pelayanan menjadi terhambat, penerapan manajemen tanah perkotaan yang tidak terkendali tampak dari terus meningkatnya harga tanah, masih terdapat pengecualian berupa surat yang menurut undang-undang harus tertulis dan juga surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dalam bentuk akta notariil/akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan SIMTANAS sudah berjalan dengan baik tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Terbukti dari masih banyaknya ditemui berbagai macam masalah yang terjadi di lapangan. Seperti terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, implementasi kebijakan pengaturan dan pelayanan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP), diperlukan bekal kesadaran baru, pemahaman, serta komitmen bagi aparat pemerintah di bidang pertanahan, dilihat dari aspek komunikasi masih ada pegawai yang belum memahami tentang kebijakan SIMTANAS karena kurangnya pembinaan langsung agar pegawai lebih memahami tentang

kebijakan SIMTANAS.

2. Dengan adanya kebijakan SIMTANAS yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan publik khususnya pelayanan pertanahan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kebijakan SIMTANAS sudah terlaksana dengan baik terbukti dari lebih banyaknya dampak positif dibandingkan dengan dampak negatif yang sudah dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan simpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut :

1. Penyederhanaan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP) dan perlunya dukungan regulasi peraturan dibidang pertanahan.
2. Meningkatkan konsistensi reforma agraria melalui kebijakan nasional dari pusat hingga ke daerah secara menyeluruh, serta harus sinerginya kewenangan pemerintah di bidang pertanahan antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, lintas sektor, dan lembaga.
3. Menyiapkan pegawai yang menguasai program dan teknik komputer dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi teknisi/programmer secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan teknologi dan aplikasi serta penyempurnaan aplikasi harus terus dilaksanakan.
4. Back up database harus terus dilaksanakan hal ini untuk menjaga bila terjadi kerusakan data (terbakar, terkena virus, dan lain-lain)
5. Merubah mindset para pegawai agar lebih profesional, mempunyai wawasan dan merasa sebagai pelayan masyarakat dengan cara membangun sikap mental disiplin aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini peneliti telah banyak menerima masukan, pengarah, serta bimbingan dari semua pihak yang telah membantu sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, perkenankanlah peneliti menghaturkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, terutama yang terhormat Bapak I Gede Sukardan Ratmasa, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung beserta seluruh pegawai di lingkungan kantor yang telah membantu dalam proses penelitian dan membantu memberikan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gasperz, Vincent, 2004. Total Quality Management. Jakarta : Gramedia.
- Larasati S, Endang, 2007. Regulasi Pelayanan Publik di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Sutabri. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan kesembilan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in : Administration and Society, Vol.6 No.4p 445-485. Clvii.